**PARIWISATA CERDAS, PARADIGMA BARU DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**

**MENUJU LAMPUNG BERJAYA**

**Dr. Ir. Citra Persada, MSc.\*,\*\***

\* Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Lampung,

\*\*Anggota DRD Provinsi Lampung 2019-2023

email: citra.persada@eng.unila.ac.id

**RINGKASAN**

*Pariwisata terus berubah sesuai zaman dan kebutuhan wisatawannya, begitu pula perencanaan pembangunan pariwisata juga harus mengikuti perubahan tersebut. Pergeseran paradigma perencanaan pariwisata lama ke pariwisata baru, pariwisata berkelanjutan, pariwisata bertanggung jawab, pariwisata berbasis masyarakat, dan terakhir adalah pariwisata cerdas di era new normal merupakan respon terhadap berbagai perubahan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan sektor pariwisata nasional maupun daerah sangat tergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang fleksibel, kreatif dan inovatif atau pariwisata cerdas. Pariwisata Lampung sedang bertahan di era pandemi covid-19, para pelaku pariwisata menunggu terobosan kebijakan cerdas dari pemerintah untuk dapat mendorong pulihnya industri pariwisata. Tulisan ini mencoba menguraikan inovasi apa yang dapat dilakukan Provinsi Lampung menuju perencanaan dan pembangunan pariwisata cerdas.*

***Kata Kunci:*** *paradigma baru, pariwisata cerdas, perencanaan, Lampung*

# PENDAHULUAN

Pariwisata global terus bergerak menuju perubahan-perubahan baru, misalnya perubahan pola perjalanan yang merupakan transisi geografis, perubahan karena perkembangan teknologi sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, perubahan konsep pariwisata berkelanjutan untuk mendukung SDG’s, dan terakhir perubahan karena pandemi covid 19. Pada tahun 2019, secara global wisatawan internasional tercacat sejumlah 1,5 miliar. Pariwisata global bergeser dari wilayah Eropah dan Amerika ke kawasan Asia Timur dan Pasifik dalam jumlah kunjungan wisatawan internasional. Pariwisata di era revolusi industri 4.0, dicirikan 3 hal yaitu pariwisata realitas virtual, pariwisata bawah laut dan pariwisata luar angkasa. Dalam tataran global, pariwisata belum melaksanakan pembangunan berkelanjutan secara total, tetapi lebih kepada pemanfaatan sumber daya dan emisi secara lebih intensif (Sutriadi, 2018).

Pariwisata Lampung, sebagaimana juga pariwisata nasional dan pariwisata global berkembang cepat dan mengalami perubahan-perubahan, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir, hal ini didorong oleh perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Saat dilanda pandemi covid awal tahun 2020, pariwisata Lampung sempat kolaps, tetapi akhir 2020 perlahan mulai bangkit dengan naiknya kunjungan wisatawan nusantara. Dunia pariwisata bukan hanya bicara target ekonomi atau obyek wisata semata, tetapi pariwisata adalah tentang manusianya dalam hal ini wisatawan dan tuan rumah (masyarakat lokal). Ketika pandemi datang, orang “dipaksa” untuk tidak melakukan perjalanan dan masyarakat lokal masih “curiga” dengan tamu dari luar atau pengunjung. Pergeseran produk dan pasar pariwisata di masa kebiasaan baru *(new normal*) adalah keniscayaan.Aspek kesehatan yang menyangkut langsung ke manusia, menjadi pertimbangan utama baik wisatawan maupun tuan rumah, oleh sebab itu adaptasi yang paling mendasar adalah membangun *branding* terkait : sehat, bersih dan aman (Persada dan Rusmiati, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, Provinsi Lampung cukup ketat menjalankan protokol kesehatan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan wisatawan domestik untuk mulai mengunjungi destinasi di Provinsi Lampung, khususnya yang berasal dari provinsi terdekat yaitu Sumatera Selatan dan Jawa bagian Barat (Banten, DKI dan Jawa Barat).

Pariwisata terus berubah sesuai zaman dan kebutuhan wisatawannya, oleh sebab itu pengembangan pariwisata juga harus mengikuti perubahan tersebut. Pergeseran paradigma konsep pariwisata lama ke pariwisata baru, pariwisata berkelanjutan, pariwisata bertanggung jawab, pariwisata berbasis masyarakat, dan terakhir adalah pariwisata cerdas merupakan respon terhadap berbagai perubahan tersebut. Pariwisata baru terbentuk oleh: liburan yang fleksibel dan harga yang kompetitif, *tailor made*, produksi ditentukan konsumen, liburan didasarkan pada kebutuhan individu yang berbeda-beda atau sangat beragam, liburan dikonsumsi dalam skala besar oleh wisatawan yang lebih terpelajar, lebih berpengalaman, lebih fleksibel, lebih mandiri dan lebih ramah lingkungan (Gunawan, 2020). Pariwisata berkelanjutan menurut Bramwell, dkk (1996) memiliki 7 dimensi yaitu: lingkungan, budaya, politik, ekonomi. sosial, manajerial dan pemerintahan. Menurut Sutriadi (2018), pariwisata cerdas dapat dipandang sebagai suatu kemajuan logika dari bentuk pariwisata tradisional yang kemudian telah disentuh dengan konsep *e-tourism* (sebelum dikenal pariwisata cerdas) dalam hal inovasi berbasis teknologi dari sisi industri dan konsumen, sistem reservasi terpusat dan distribusi global, serta integrasi web.

Tema berbasis kecerdasan berkembang akhir-akhir ini, kecerdasan yang populer di masyarakat lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi, mulai dari perangkat lunak sampai pada perangkat keras serta pengembangan aplikasi. Dalam konteks pariwisata cerdas, pariwisata sebagai proses penciptaan produk jasa, maka kecerdasan dapat diartikan sebagai suatu hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bentuk inovasi yang menerus untuk memberikan pemecahan masalah yang lebih baik di masa yang akan datang. Pariwisata cerdas ada pada destinasi cerdas. Destinasi cerdas merupakan cara-cara inovatif terkait destinasi wisatawan, dibangun dalam bentuk infrastruktur dan teknologi untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dari tempat-tempat wisata, dapat tersedia bagi semua orang, membantu wisatawan untuk berinteraksi dan berintegrasi dengan lingkungannya, meningkatan kualitas pengalaman dari destinasi wisata, serta sekaligus pula meningkatkan kualitas kehidupan warga (Avila dalam Gretzel, dkk., 2015). Pengembangan pariwisata cerdas di daerah sangat tergantung pada kebijakan yang dibuat pemerintah daerah, selanjutnya kebijakan harus diikuti perencanaan yang cerdas, dan perencanaan cerdas tersebut menjadi komitmen bagi semua pihak untuk diimplementasikan.

Menurut Gunawan (2020) ada 5 hal mendasar yang memerlukan pemikiran lebih lanjut dalam pengembangan pariwisata Indonesia, yaitu: (1) posisi pariwisata dalam pembangunan nasional; (2) pendataan; (3) perencanaan kepariwisataan; (4) pariwisata nusantara dan (5) pendidikan kepariwisataan. Secara umum hal tersebut juga ditemukan dalam konteks wilayah atau daerah, walaupun ada destinasi pariwisata yang berhasil di Indonesia tentu sudah lebih dahulu dalam melakukan terobosan berkaitan dengan beberapa atau ke lima aspek mendasar tersebut. Tulisan ini akan menguraikan salah satu dari pemikiran mendasar tersebut, yaitu bagaimana perencanaan pariwisata di Provinsi Lampung. Apa saja potensi dan peluang pengembangan pariwisata cerdas dalam di Provinsi Lampung.

# POTENSI DAN PELUANG PARIWISATA LAMPUNG MENUJU PERENCANAAN PARIWISATA CERDAS

## Pariwisata dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung

Dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RTRW, atau Renstra SKPD) Provinsi Lampung memposisikan pariwisata cukup strategis dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini terlihat dari visi,misi kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung serta pariwisata sudah terintegrasi ke dalam RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota (Persada, 2018). Tetapi perencanaan yang baik saja tidak cukup, jika tidak diikuti implementasi yang baik pula. Disamping RPJMD, RTRW dan Renstra SKPD, perencanaan pembangunan pariwisata secara lebih khusus ada dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) belum menjadi acuan pengebangan pariwisata, karena belum semua RIPPDA memiliki kekuatan hukum atau Perda.

Periode pembangunan pariwisata 10 tahun terakhir (2010-2020) adalah periode dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Hal ini berimplikasi pada perubahan pola perjalanan dan komunikasi wisatawan di dunia, termasuk juga di Indonesia dan Provinsi Lampung. Wisatawan dengan mudah dapat berkomunikasi dengan *guide* atau pramuwisata lokal di destinasi wisata yang terpencil sekalipun. Akibatnya adalah obyek dan daya tarik wisata yang awalnya belum berkembang bisa saja tiba-tiba sangat terkenal. Misalnya: Pahawang dan sekitarnya, Teluk Kiluan dan sekitarnya, Pulau Sebesi dan sekitar Gunung Anak Krakatau dengan cepat menjadi sangat populer di kalangan wisatawan, terutama kelompok remaja dan profesional muda sebagai pengguna internet terbanyak. Jika dicermati rencana dan kebijakan pemerintah daerah sebelum tahun 2010, Pulau Pahawang dan sekitarnya, Teluk Kiluan dan sekitarnya, belum menjadi prioritas di RIPPDA Provinsi maupun Kabupaten. Baru setelah tahun 2010, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota memasukkan destinasi tersebut dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Perencanaan seringkali terlambat mengikuti perkembangan di lapangan, apalagi berbagai regulasi yang mengikutinya. Oleh sebab itu perencanaan pariwisata Lampung ke depan hendaklah perencanaan yang visioner, mempertimbangkan inovasi teknologi, keterpaduan lintas sektor, berpihak pada masyarakat dan berkelanjutan dan menemukan inovasi-inovasi dalam berbagai aspek perencanaan pembangunan serta berbasis ilmu pengetahuan atau dengan kata lain perencanaan destinasi cerdas.

RIPPDA Provinsi Lampung sejak awal disusun sudah mengalami 2 kali revisi, tahun 2012, tahun 2016. Dalam review RIPPDA tersebut Provinsi Lampung dibagi ke dalam 3 Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) yaitu: 1. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Teluk Lampung , Selat Sunda dan sekitar. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pesisir Pantai Barat Lampung dan sekitarnya 3. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Taman Nasional Way Kambas dan sekitar. Sebagai produk perencanaan, RIPPDA Provinsi Lampung 2010-2025 sudah sangat komprehensif memuat substansi yang diamanatkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2016. Selanjutnya sejalan dengan visi pariwisata Lampung yaitu “Terwujudnya Lampung sebagai wilayah tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu menopang masyarakat Lampung Maju dan Sejahtera”, maka pada misi dan berbagai program strategik yang disusun juga diharapkan dapat menjadi payung pembangunan pariwisata Lampung. Secara spesifik dalam indikasi program RIPPDA mencantumkan 3 lokasi pengembangan yaitu KEK Teluk Nipah di Kabupaten Lampung Selatan, Observatorium di Kabupaten Pesawaran, serta KEK Pesisir Barat. Sementara itu pada awal tahun 2020, Pemerintah Pusat meluncurkan KEK Bakauheni, tentu saja perlu penyesuaian kembali RIPPDA tersebut. Jika dilihat dalam penentuan sasaran pasar, dari hasil analisis pasar tidak ada target yang pasti tentang kelompok pasar baik menurut karakteristik dan pola perjalanan, atau preferensi, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Juga tidak ada targetan jumlah, berapa wisatawan yang diharapkan datang ke Lampung 5 atau 10 tahun yang akan datang. Pada jenis pariwisata yang akan dikembangkan, Provinsi Lampung mendorong pariwisata massal, yang memang menjadi andalan sebelum pandemi. Tetapi setelah pandemi tentu sasaran pasar jenis ini perlu revisi kembali sesuai dengan pergeseran karakteristik dan pola perjalanan wisatawan di era kenormalan baru.

Sampai akhir tahun 2020, setelah 4 tahun setelah revisi, RIPPDA sampai saat ini belum menjadi Perda. Artinya belum memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan program pembangunan pariwisata atau dengan kata lain posisi sektor pariwisata dalam kebijakan pembangunan Lampung 5 tahun ke depan masih belum kuat. *Politicall will* dan rencana saja tidak cukup, tetapi implementasi rencana dan konsistensi menjalankan rencana yang sudah dibuat tentunya sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata Lampung.

Gubernur Lampung periode 2019-2024 menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan, seperti yang tercantum dalam janji ke 8 dan 9 dari 33 janji kampanyenya. Janji ke 8 adalah: Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan : (a) Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung; (b) Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia; (c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata dan (d) Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Serai, Pesisir Tengah (Krui). Janji ke 9 adalah: Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan. Sejalan dengan janji tersebut, sampai akhir tahun 2020 ini belum ada inovasi baru dalam program kegiatan berkaitan dengan pariwisata yang potensial menarik kedatangan wisatawan lebih banyak. Pariwisata Lampung masih jalan sendiri, mengikuti mekanisme pasar.

Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung juga sudah melakukan penyusunan RIPPDA dan bahkan beberapa daerah sudah menyusun rencana kawasan seperti: Rencana Pengembangan Kawasan Batu Putu Kota Bandar Lampung, Rencana kawasan Bakauheni dan sekitarnya Kabupaten Lampung Selatan, Rencana Kawasan Bawang Latak Kabupaten Tulang Bawang. Sebagaimana juga RIPPDA Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang sudah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) seperti Kota Bandarlampung yang disusun tahun 2001 dan 2020, Kabupaten Tulang Bawang yang disusun tahun 2008. Hampir semua RIPPDA tersebut belum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), sehingga daerah umumnya belum memiliki acuan yang berkekuatan hukum dan tentunya ini berdampak pada alokasi anggaran dan belum menjadi prioritas pengembangan.

Pada penyusunan RIPPDA Kabupaten/Kota tersebut sangat beragam formatnya, sebagian mengacu pada pedoman yang pernah diterbitkan Pemerintah Pusat, dan sebagian lagi tergantung kepada persepsi penyusunannya dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman pribadi masing-masing. Umumnya program yang dihasilkan dalam RIPPDA sifatnya generik, melengkapi prasarana dan sarana, rehabilitasi objek dan peningkatan sumber daya manusia serta promosi. Hampir semua tidak melakukan kajian pasar dan kajian wilayah yang mendalam, sehingga kemana arah pengembangan sulit difokuskan dan promosi pun menjadi sangat umum (Persada, 2018).

## Pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Perencanaan pariwisata perlu dilakukan secara sistematik dan selaras dengan perencanaan wilayah dan kota, dalam hal ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung. Tujuan penataan ruang Provinsi Lampung dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 adalah terwujudnya keterpaduan penataan ruang Provinsi Lampung untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Revisi RTRW 2010-2029 pada tahun 2016 menetapkan kawasan peruntukan pariwisata dalam rencana pengembangan pariwisata Provinsi Lampung sebagai berikut: (1) Pengembangan wisata pantai barat Lampung meliputi Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat, (2) Pengembangan Kawasan TNWK menjadi *Lampung Safari Way Kambas Park* dan *Conservation Center* dan (3)Pengembangan kawasan wisata terintegrasi Teluk Lampung yang meliputi: Kabupaten Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran dan Tanggamus. Dalam seluruh RTRW Kabupaten/Kota sektor pariwisata sudah dicantumkan, ada RTRW yang memuat pariwisata mulai dari kebijakan, strategi, peruntukan kawasan sampai pada peraturan zonasi dan ada RTRW yang hanya mencantumkan peruntukan kawasan pariwisata saja (Persada, 2018).

Secara umum dapat dikatakan bahwa dokumen perencanaan pariwisata skala Provinsi maupun Kabupaten/kota telah disusun, dalam format yang berbeda-beda, kedalaman substansi yang berbeda-beda dan umumnya belum jadi Perda. Artinya dokumen ini belum menjadi acuan dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Lampung, padahal sudah menghabiskan anggaran cukup besar dalam penyusunannya.

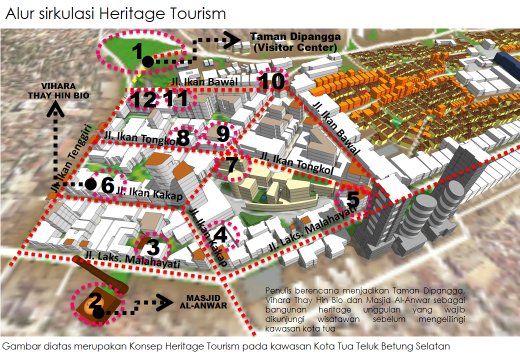
# PERUBAHAN PARADIGMA MENUJU PERENCANAAN PARIWISATA CERDAS

Berdasarkan pada kajian perencanaan pariwisata baik skala provinsi maupun skala kabupaten/kota di atas, maka perlu adanya perubahan paradigma dalam perencanaan pariwisata di Provinsi Lampung agar lebih fleksibel dan dapat mengakomodasi perubahan pariwisata yang cepat. Penerapan perencanaan pariwisata cerdas sudah saatnya dilakukan. Pendekatan perencanaan pariwisata cerdas dalam tulisan ini mengacu pada perencanaan kota dan wilayah, menurut Sutriadi (2018) konsep kecerdasan dari sisi perencanaan kota dan wilayah menekankan pada pendekatan perencanaan berkelanjutan dengan basis ilmu pengetahuan, dengan menekankan proses pembelajaran terus menerus sebagai bagian dari pembangunan dan pengembangan sumber daya. Konsep ini membutuhkan kreatifitas dan inovasi untuk meningkatkan daya saing kawasan secara berkelanjutan.

Pembelajaran dari perencanaan cerdas di negara-negara seperti Singapura dan Tiongkok dimana perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang konsisten menghasilkan pariwisata yang unggul dan berdaya saing. “Di Tiongkok, pemerintah berada di depan memimpin dengan konsep yang jelas dan kuat, membangun manusia cerdas melalui jalur akademik dan memberikan dukungan penelitian untuk mematangkan konsep dan menyusun strategi untuk mentransfer konsep akademik ke dalam praktik-praktik industrial. Melaksanakan *pilot project*, setelah berhasil dikembangkan ke banyak destinasi. Memanfaatkan media baru dan teknologi yang didukung pendataan. Kerjasama para pihak antara pemerintah, pelaku pariwisata dan akademisi berjalan baik (Gunawan, 2020). Di Indonesia, beberapa destinasi pariwisata, sudah melaksanakan sebagian dari konsep pariwisata cerdas, seperti: Kabupaten Banyuwangi, Kota Sawahlunto, Desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Desa Pamuteran, Kabupaten Buleleng, Bali. Kabupaten Banyuwangi dan Kota Sawahlunto inisiatif datang dari kepala daerah yang visioner, sedangkan untuk desa-desa wisata yang berhasil inisiatif umumnya berasal dari akar rumput, baik Karang Taruna, Pokdarwis dan kelompok masyarakat lainnya.

Bagaimana di Provinsi Lampung?. Destinasi wisata yang berkembang atas inisiatif akar rumput adalah Pulau Pahawang (Kabupaten Pesawaran) dan Teluk Kiluan (Kabupaten Tanggamus). Tahap selanjutnya adalah kedua kabupaten tersebut hendaknya menyusun perencanaan pariwisata yang cerdas untuk mengembangkan kedua destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan ini, khususnya inovasi-inovasi berkaitan dengan bentuk infrastruktur dan teknologi untuk menjamin tempat wisata yang berkelanjutan, sehingga dapat menjamin peningkatan kualitas pengalaman wisatawan serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.

Kota Bandarlampung adalah salah satu destinasi yang seharusnya paling siap menjadi destinasi pariwisata cerdas. Menurut Gunawan (2020) “ pariwisata cerdas sebagai bagian dari kota cerdas, menegaskan peran penting kota-kota sebagai destinasi. Aksesibilitas mencakup akses fisik terkait pergerakan wisatawan dan kaitannya dengan sistem transportasi pendukung, akses terhadap data dan informasi serta akses bagi para difabel. Digitalisasi menjadi norma, seperti halnya pariwisata berkelanjutan. Pusaka Budaya dalam berbagai bentuk ditingkatkan pemanfaatannya melalui berbagai kreativitas dan inovasi”. Berdasarkan konsep pariwisata cerdas tersebut, beberapa inovasi dapat dilakukan terkait pusaka budaya seperti: perencanaan kawasan kota tua yang bersejarah sebagai Bandar Lampung *Heritage Tourism* (Gambar 1), pengembangan Festival Budaya, pengembangan lokasi wisata Kuliner Lampung (Pasar Malam Mambo sebagai pusat kuliner ) dan Bandar Lampung City of Krakatau (lokasi monumen beberapa pelampung kapal yang terlempar ketika tsunami Krakatau 1883).



**Gambar 1.** Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Cagar Budaya di Bandar Lampung (Octadynata, dkk, 2020).

# BAGAIMANA PERENCANAAN CERDAS UNTUK LAMPUNG?

Terkait janji gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2024, perencanaan cerdas bidang pariwisata terutama dapat dilakukan pada 2 aspek yaitu: inovasi dalam perencanaan dan inovasi dalam substansi perencanaan. Secara detail akan diuraikan sebagai berikut. Inovasi proses perencanaan seperti: proses perencanaan berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk mendorong efisiensi dan melibatkan partisipasi para pihak (stakeholders) terutama masyarakat pariwisata, pelaku bisnis dan perguruan tinggi . Berbagai penelitian dan pengabdian masyarakat di berbagai PT di Lampung sudah banyak yang menghidupkan desa wisata, tetapi belum pernah secara khusus duduk bersama pemerintah dan stakeholders lainnya untuk membangun komitmen bersama. Begitu juga tourism society di Provinsi Lampung, disamping organisasi profesional seperti ASITA, PHRI, HPI, PUTRI, IHGMA, dan lain-lain yang secara rutin terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengembangan pariwisata, ada komunitas lain yang juga bergerak di akar rumput, seperti : Forum CSR Lampung dan LITB (Lampung Investment Tourism Board) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang telah banyak melakukan berbagai program konkrit ke masyarakat di destinasi wisata. Komunitas tersebut dapat diajak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam penyusunan roadmap atau action plan pariwisata Lampung.

Inovasi dalam substansi perencanaan: penetapan jenis wisata unggulan yang ramah lingkungan dan inklusif untuk berbagai tipe wisatawan; penentuan sasaran pasar domestik dari provinsi terdekat; pengembangan destinasi pusaka budaya seperti: revitalisasi Kawasan Kota Tua Bandar Lampung, berbagai Festival Budaya dengan mengangkat kearifan lokal yang khas (misalnya: Festival Minum Kopi, Festival memetik Lada/Damar, Festival Layangan Perahu) untuk menambah *calender of event* pariwisata Lampung dan *Krakatau Geopark Run* dan sebagainya. Pada substansi perencanaan ini materi janji gubernur dan wakil gubernur dapat dimasukkan, seperti janji ke 8 tentang wisata unggulan, agrowisata dan ekowisata, janji ke 9 untuk Festival Kopi, Festival Kuliner dan lain-lain. Sedangkan janji yang tidak terkait langsung dengan pariwisata adalah janji 30 tentang *Smart Village* dapat dikembangkan bersama janji ke 8 menjadi *Smart Tourism Village* sejalan dengan paradigma pariwisata cerdas di atas.

# PENUTUP

Akhirnya dapat disimpulkan, gambaran perencanaan pariwisata Lampung dan potensi serta peluang Provinsi Lampung untuk menuju perencanaan pembangunan pariwisata cerdas sebagai berikut:

1. Perkembangan perencanaan pembangunan pariwisata Lampung selama lebih kurang 30 tahun terakhir (1990-2020), menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pariwisata ataupun Perda RIPPDA belum dijadikan acuan pembangunan. RIPPDA Provinsi Lampung masih hanya sebatas dokumen perencanaan, walaupun hampir setiap 5 tahun dilakukan revisi. Secara legalitas, RIPPDA belum menjadi Perda, maka masih belum kuat secara hukum menjadi acuan pembangunan daerah. Secara substansi RIPPDA juga masih belum seragam dan mengacu pada UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan. Disamping belum seragam dan lengkap, substansi RIPPDA belum memuat inovasi baru, masih normatif mengikuti pedoman yang ada, padahal perkembangan di lapangan sudah berubah jauh mengikuti perubahan pariwisata global karena Revolusi Industri 4.0 dan adanya era kenormalan baru akibat pandemi covid 19. Kebijakan pembangunan pariwisata sudah terintegrasi ke dalam Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sehingga diharapkan pariwisata dapat ikut memacu pengembangan wilayah atau menurunkan angka kemiskinan terutama pada wilayah perdesaan, terpencil, terisolir, maupun perbatasan Lampung. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam dokumen perencanaan tata ruang, pariwisata sudah terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya dalam kerangka ruang dan waktu perencanaan.
2. Pariwisata Lampung terus berkembang, menuju perubahan-perubahan baru, oleh sebab itu dibutuhkan perencanaan yang fleksibel, kreatif dan inovatif atau perencanaan pariwisata cerdas. Dari sisi *political will*, Pemerintah Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota percaya bahwa sektor yang paling dapat bertahan dan menyentuh langsung ke masyarakat adalah sektor pariwisata. Tetapi kemauan politik ini belum didukung dengan kesiapan berbagai hal terutama perencanaan terkait koordinasi antar kelembagaan, pembangunan infrastruktur dan teknologi, dan ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pariwisata agar wisatawan dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan lingkungannya, agar dapat meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.
3. Provinsi Lampung memiliki potensi dan peluang untuk pengembangan pariwisata cerdas dalam berbagai tahapan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Pada tahap perencanaan berbagai dokumen perencanaan pembangunan seperti RTRW sebagai rencana spasial, RPJMD sebagai rencana pembangunan dan Renstra SKPD sebagai rencana sektoral (misal: RIPPDA) sudah banyak mencantumkan pariwisata sebagai sektor prioritas, baik skala provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kelemahan ditemukan pada tahap implementasi dari rencana tersebut, selain belum semua RIPPDA sudah menjadi Perda, juga lemahnya komitmen para pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata. Hal terpenting dalam pembangunan pariwisata cerdas bukanlah pada perencanaan yang bagus saja, namun yang terpenting adalah konsistensi dalam implementasi sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Implementasi tersebut tentunya disertai dengan monitoring, pengukuran kinerja secara periodik serta evaluasi perbaikan dari waktu ke waktu untuk memastikan implementasi yang dilakukan masih *on the track* sesuai dengan rencana. Agar pariwisata cerdas dapat terlaksana, maka hendaklah didukung adanya ekosistem inovasi dimana ada keselarasan yang dinamik antar elemen dalam perencanaan pembangunan pariwisata tersebut.
4. Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa cepat pemulihan pariwisata di era *new normal*. Respon kebijakan yang tepat di bidang pariwisata, kondisi psikologis positif masyarakat untuk kembali berwisata, dan kesiapan masyarakat di destinasi pariwisata adalah tiga hal yang utama. Wisatawan akan yakin melakukan perjalanan, jika ada jaminan dari pemerintah bahwa destinasi pariwisata siap menerima wisatawan dengan protokol kesehatan, kebersihan dan keamanan. Selanjutnya pengelolaan destinasi wisata sangat membutuhkan dukungan masyarakat setempat, karena disamping menyiapkan fasilitas fisik sesuai protokol kesehatan, yang juga amat penting adalah kesiapan masyarakat lokal menjaga kebersihan dan keamanan. Kesiapan *stakeholders* bidang pariwisata, mulai dari pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata (swasta atau pengelola wisata, dan masyarakat) menjadi kunci *new normal.* Dari sisi kebijakan, Provinsi Lampung memiliki potensi pariwisata yang sangat mungkin dikembangkan, oleh sebab itu perlu dilakukan ***re-plan, re-focus dan re-upgrade*** di bidang pariwisata. Pengelola pariwisata segera berbenah melakukan ***re-branding***bersama pemerintah daerah. Kampanye dan uji coba pariwisata yang bersih, sehat, dan aman dapat segera dilakukan, dilanjutkan dengan sertifikasi destinasi wisata yang memenuhi syarat untuk dikunjungi agar pariwisata menggeliat kembali.
5. Terkait janji gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2024, inovasi dalam perencanaan yang dapat dilakukan adalah inovasi dalam proses perencanaan dengan melibatkan para pihak sebagai salah satu elemen dari ekosistem kecerdasan atau inovasi, inovasi dalam substansi perencanaan yang lebih melahirkan program-program inovatif bidang lingkungan, pusaka budaya, dan teknologi, dan perencanaan ruang secara cerdas seperti: *smart tourism village*,

# DAFTAR PUSTAKA

1. Bramwell, B. Henry, I., Jackson, G. And van der Straaten, J. (1996) A framework for understanding sustainable tourism.
2. Gretzel,U., Sigala, M., Xiang, Z., and Koo, C. (2015), *Smart Tourism: foundations and developments,* New York, Springer.
3. Gunawan, M.P (2020), Inovasi Sosial dan Teknologi dalam Membangun Kepariwisataan Cerdas, Penerbit ITB Press. Bandung.
4. Persada, C. (2018), Perencanaan Pariwisata dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan: Teori dan Praktik. Aura. Bandar Lampung.
5. Persada, C. dan Rusmiati, F. (2020) Ketika Pariwisata Terguncang dan Beradaptasi Menghadapi Pandemi Covid 19 dalam Covid 19 dan Disrupsi : Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi Politik dan Multi, Syafaruddin dkk (eds). Pusaka Media. Bandarlampung.
6. Sutriadi, Ridwan (2018) Pariwisata Cerdas: Perspektif Perencana Kota, Penerbit ITB Press. Bandung
7. Octadynata, A., Persada, C., Prasetyo, W. E. (2020) Rancangan Kawasan Kota Tua Teluk Betung Selatan Sebagai Destinasi Wisata Kota Bandar Lampung: Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman LOSARI, 5 (2), 96-107
8. BAPPEDA Provinsi Lampung (2016), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Lampung.
9. BAPPEDA Kota Bandar Lampung, (2020) Draft Final Rencana Induk Pengembangan Pariwisata kota Bandar Lampung.